

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN

Analysis of Village Fund Allocation Management Financial Performance Based on Effectiveness and Growth Ratios

Vira Astutika Ayu¹, Raju Maulana², Helly Khairuddin³
Email: astutikaayu1998@gmail.com¹, rajumaulana88@gmail.com²,
hellykhairuddinunisi@gmail.com³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri
Jl. R. Soebrantas Tembilaan hilir – Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dan pertumbuhan realisasi anggaran menjadi indikator utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih ditemukannya permasalahan dalam perencanaan dan realisasi anggaran desa yang berdampak pada keberlanjutan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan Desa Makmur Jaya periode tahun 2024–2025. Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan berdasarkan realisasi dan anggaran pendapatan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2024 rasio efektivitas berada pada kategori efektif sebesar 99%, sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan menjadi 66,13% dengan kategori kurang efektif. Sementara itu, rasio pertumbuhan menunjukkan nilai negatif pada kedua tahun penelitian, dengan penurunan tajam pada tahun 2025 sebesar -42,6%. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pengelolaan ADD di Desa Makmur Jaya belum optimal. Temuan penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Alokasi Dana Desa, kinerja keuangan, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan*

Abstract

The management of Village Fund Allocation (ADD) is an important aspect in supporting rural development and improving community welfare. The effectiveness and growth of budget realization are key indicators in assessing the financial performance of village governments. This study aims to analyze the financial performance of Village Fund Allocation management in Makmur Jaya Village, Kateman District, Indragiri Hilir Regency by using effectiveness and growth ratios. This research is important considering that problems in budget planning and realization are still frequently encountered and may affect the sustainability of village development. This study employs a descriptive research method with a quantitative approach. The data used are secondary data in the form of financial statements of Makmur Jaya Village for the 2024–2025 period. Data analysis techniques were carried out by calculating the effectiveness ratio and growth ratio based on the comparison between budget targets and realized village revenues. The results show that in 2024 the effectiveness ratio was categorized as effective at 99%, while in 2025 it experienced a significant decline to 66.13%, which falls into the less effective category. Meanwhile, the growth ratio shows negative values in both years, with a sharp decline in 2025 reaching -42.6%. These findings indicate that the financial performance of Village Fund Allocation management in Makmur Jaya Village has not been optimal. The results of this study are important as an evaluation material for village governments to improve the quality of financial planning and management in a sustainable manner.

Keywords: *Village Fund Allocation, Financial Performance, Effectiveness Ratio, Growth Ratio.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen penting pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa di Indonesia. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan [10], [16]. Sejak diberlakukannya kebijakan transfer fiskal melalui Dana Desa dan ADD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [22], pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Efektivitas pemanfaatan ADD menentukan kemampuan desa dalam merealisasikan program-program prioritas sesuai dengan perencanaan anggaran pada APBDes [2].

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam menilai kinerja keuangan sektor publik, termasuk pemerintah desa, adalah analisis rasio keuangan [3]. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBDes, sedangkan rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai kemampuan desa dalam meningkatkan kinerja keuangannya dari satu periode ke periode berikutnya [8]. Analisis kedua rasio ini tidak hanya menilai capaian realisasi anggaran pada satu tahun tertentu, tetapi juga menunjukkan tren perkembangan pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan [9].

Fenomena di berbagai desa menunjukkan bahwa realisasi ADD sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, lemahnya perencanaan anggaran, perubahan prioritas pembangunan, serta keterlambatan pencairan dana [1], [13] juga menemukan bahwa ketidaksesuaian antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan program pembangunan desa berdampak langsung pada capaian hasil pembangunan yang diharapkan masyarakat. Di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya wilayah pesisir seperti Kecamatan Kateman, kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, penanganan lingkungan, dan abrasi menuntut pengelolaan ADD yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. [11] menegaskan bahwa desentralisasi fiskal hanya akan berdampak optimal apabila pemerintah daerah dan desa mampu mengelola otonominya secara akuntabel dan transparan. Desa Makmur Jaya sebagai salah satu desa di Kecamatan Kateman menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan fisik dan nonfisik dengan keterbatasan kapasitas pengelolaan keuangan desa.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait kinerja keuangan pengelolaan dana desa. [23] menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan ADD di beberapa desa masih berada pada kategori cukup efektif, namun pertumbuhan realisasi anggaran cenderung fluktuatif akibat perubahan prioritas program desa. [14] menunjukkan bahwa desa dengan perencanaan APBDes yang baik mampu mencapai rasio efektivitas tinggi secara konsisten, meskipun pertumbuhan anggaran belum stabil. Sementara itu, [12] menegaskan bahwa efektivitas dan pertumbuhan pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa dan transparansi pengelolaan anggaran. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja keuangan desa bersifat kontekstual dan dipengaruhi karakteristik wilayah, kapasitas kelembagaan, serta prioritas pembangunan lokal.

Research gap yang teridentifikasi adalah masih terbatasnya penelitian yang secara spesifik mengkaji dinamika kinerja keuangan ADD pada desa-desa di kawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengintegrasikan dua rasio sekaligus efektivitas dan pertumbuhan dalam periode anggaran yang berdekatan. Studi terdahulu umumnya bersifat parsial atau mengkaji wilayah dengan karakteristik geografis yang berbeda, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi spesifik desa-desa pesisir yang memiliki tantangan pengelolaan anggaran yang unik. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana kinerja keuangan pengelolaan ADD di Desa Makmur Jaya berdasarkan rasio efektivitas tahun 2024–2025? (2) Bagaimana perkembangan kinerja keuangan pengelolaan ADD di Desa Makmur Jaya berdasarkan rasio pertumbuhan tahun 2024–2025?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pengelolaan ADD di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan periode 2024–2025. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi sektor publik khususnya terkait akuntabilitas keuangan desa di kawasan pesisir. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam meningkatkan

kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan metode deskriptif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada penggambaran dan evaluasi kondisi aktual kinerja keuangan pengelolaan ADD pada periode tertentu, tanpa bermaksud menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel [20]. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berupa angka-angka yang dapat dihitung dan dianalisis menggunakan formula rasio keuangan yang telah baku [4]. Keterbatasan metode ini adalah tidak mampu menjelaskan faktor penyebab secara mendalam dan hasilnya terbatas pada gambaran kondisi objek penelitian pada rentang waktu yang diteliti.

Objek penelitian adalah laporan keuangan Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun anggaran 2024–2025. Penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling karena seluruh data laporan keuangan yang tersedia digunakan sebagai objek analisis, sesuai karakteristik penelitian deskriptif yang mengkaji objek penelitian secara komprehensif [21]. Data dikumpulkan melalui dokumentasi laporan realisasi anggaran pendapatan desa yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Makmur Jaya. Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung dua rasio keuangan pemerintah desa, yaitu:

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan desa yang bersumber dari ADD dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBDes [3]. Formula yang digunakan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 [6]:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD daerah}}{\text{Anggaran PAD Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas dan kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan (Kepmendagri No. 690.900.327/1996 [6])

Kriteria Efektivitas	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	≤ 60%

2. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah desa mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari satu periode ke periode berikutnya [15]. Semakin tinggi nilai rasio pertumbuhan, semakin baik kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan realisasi pendapatannya. Formula yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan pemerintah daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Perhitungan Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut dijelaskan melalui tabel dibawah :

Tabel 2. Rasio Efektivitas Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman

Tahun	Realisasi Pendapatan ADD (Rp)	Anggaran Pendapatan ADD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kategori
2024	524.710.216	529.647.400	99,07	Efektif
2025	301.292.648	455.587.400	66,13	Kurang Efektif

Sumber : data olahan, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, realisasi pendapatan ADD Desa Makmur Jaya mencapai Rp 524.710.216 dari anggaran sebesar Rp 529.647.400, sehingga diperoleh rasio efektivitas sebesar 99,07% dengan kategori "Efektif". Selisih antara anggaran dan realisasi hanya sebesar Rp 4.937.184 atau sekitar 0,93% dari total anggaran. Pada tahun 2025, realisasi pendapatan ADD turun menjadi Rp 301.292.648 dari anggaran Rp 455.587.400, menghasilkan rasio efektivitas sebesar 66,13% yang termasuk kategori "Kurang Efektif" berdasarkan kriteria Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 [6]. Penurunan rasio terjadi sebesar 32,94 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan ADD Desa Makmur Jaya periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rasio Pertumbuhan Desa Makmur Jaya Kecamatan Kateman

Tahun	Realisasi Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)	Selisih (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)
2024	524.710.216	529.647.400	-4.937.184	-0,93
2025	301.292.648	524.710.216	-223.417.568	-42,58

Sumber : data Olahan, 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan ADD Desa Makmur Jaya bernilai negatif pada kedua tahun analisis. Pada tahun 2024, rasio pertumbuhan sebesar -0,93% mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan ADD sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan selisih Rp 4.937.184. Kondisi ini kemudian memburuk secara drastis pada tahun 2025, di mana rasio pertumbuhan mencapai -42,58% akibat penurunan realisasi sebesar Rp 223.417.568 dibandingkan tahun 2024. Dengan demikian, kinerja keuangan ADD Desa Makmur Jaya mengalami tren penurunan yang signifikan dan konsisten selama periode penelitian.

Pembahasan

1. Rasio Efektivitas

Konsep efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah merujuk pada kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran yang telah ditetapkan [2], [3] menjelaskan bahwa efektivitas merupakan salah satu pilar utama akuntabilitas publik, di mana pemerintah desa berkewajiban memastikan setiap rupiah anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai tujuan. Berdasarkan perspektif teori ini, pencapaian rasio efektivitas sebesar 99,07% pada tahun 2024 mencerminkan bahwa pemerintah Desa Makmur Jaya telah menjalankan fungsi akuntabilitasnya dengan baik pada periode tersebut, dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran ADD yang relatif selaras.

Temuan ini sejalan dengan [14] yang menemukan bahwa desa-desa dengan kualitas perencanaan APBDes yang matang dan partisipatif mampu secara konsisten mencapai rasio efektivitas di atas 90%. Hal yang sama juga disampaikan [18] yang menegaskan bahwa konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran merupakan indikator utama kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. [19] menambahkan bahwa penilaian kinerja keuangan melalui rasio keuangan merupakan instrumen yang efektif untuk mengidentifikasi

kekuatan dan kelemahan pengelolaan anggaran sektor publik secara objektif.

Sebaliknya, penurunan rasio efektivitas menjadi 66,13% pada tahun 2025 menunjukkan adanya disfungsi dalam siklus penganggaran desa. [8] menjelaskan bahwa rasio efektivitas di bawah 80% mengindikasikan adanya gap yang signifikan antara kapasitas perencanaan dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini konsisten dengan temuan [23] yang mengidentifikasi bahwa penurunan efektivitas ADD pada sejumlah desa umumnya dipicu oleh perubahan prioritas program yang terjadi setelah APBDes ditetapkan, keterlambatan pencairan dana, dan lemahnya koordinasi antara aparatur desa dengan pemerintah kabupaten. Dari perspektif akuntabilitas publik [2], penurunan drastis ini mengindikasikan melemahnya pertanggungjawaban fiskal pemerintah desa kepada masyarakat atas target yang telah disepakati dalam musyawarah desa.

2. Rasio Pertumbuhan

[8] menegaskan bahwa rasio pertumbuhan yang positif dan meningkat merupakan cerminan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kapasitas fiskalnya dari satu periode ke periode berikutnya. Sebaliknya, rasio pertumbuhan yang negatif secara berturut-turut mengindikasikan adanya masalah struktural dalam pengelolaan keuangan yang perlu segera ditangani. Mengacu pada kerangka teori ini, nilai rasio pertumbuhan Desa Makmur Jaya yang negatif pada tahun 2024 (-0,93%) dan semakin dalam pada tahun 2025 (-42,58%) mencerminkan adanya masalah struktural yang tidak tertangani antartahun anggaran.

[12] menemukan bahwa penurunan tajam rasio pertumbuhan keuangan desa umumnya berkaitan erat dengan dua faktor utama: melemahnya kompetensi aparatur dalam penyusunan rencana anggaran berbasis data, dan rendahnya transparansi dalam pelaporan keuangan yang menghambat proses evaluasi dan perbaikan. Temuan ini relevan untuk menjelaskan kondisi Desa Makmur Jaya, di mana ketidakmampuan mengoreksi tren negatif dari 2024 ke 2025 mengindikasikan tidak adanya mekanisme evaluasi antartahun yang efektif. Sejalan dengan itu, [17] menunjukkan bahwa fluktuasi negatif realisasi anggaran desa secara langsung berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pembangunan prioritas, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, kombinasi rasio efektivitas yang menurun tajam dan rasio pertumbuhan yang sangat negatif pada tahun 2025 mengindikasikan adanya masalah fundamental dalam tata kelola keuangan Desa Makmur Jaya. [7] menegaskan bahwa variasi anggaran yang besar dan pertumbuhan negatif yang konsisten merupakan sinyal peringatan dini yang memerlukan intervensi dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pendampingan teknis maupun penguatan kapasitas aparatur desa. Kondisi ini membutuhkan respons komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan agar kinerja keuangan ADD Desa Makmur Jaya dapat dipulihkan pada periode anggaran berikutnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Makmur Jaya berada dalam kondisi yang menurun dan memerlukan perhatian serius. Pada tahun 2024, rasio efektivitas mencapai 99,07% (kategori efektif), menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran ADD berjalan relatif baik. Namun pada tahun 2025, rasio efektivitas menurun drastis menjadi 66,13% (kategori kurang efektif), mengindikasikan adanya gangguan serius dalam siklus penganggaran desa. Rasio pertumbuhan menunjukkan nilai negatif pada kedua tahun, dengan penurunan ekstrem pada 2025 sebesar -42,58%, yang berarti realisasi pendapatan ADD berkurang hampir separuhnya dibandingkan tahun sebelumnya.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memberikan bukti empiris bahwa kinerja keuangan desa bersifat sangat kontekstual dan rentan terhadap dinamika lokal, khususnya pada desa-desa pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir. Temuan ini memperkuat dan memperluas literatur akuntabilitas sektor publik dalam konteks pemerintahan desa. Penting untuk dicatat bahwa generalisasi hasil penelitian ini hanya berlaku pada konteks Desa Makmur Jaya dan desa-desa dengan karakteristik serupa, mengingat studi ini berbasis pada satu objek penelitian dengan rentang waktu dua tahun.

Saran

Bagi pemerintah desa, perlu Melakukan pelatihan intensif bagi aparatur desa, khususnya bendahara desa dan sekretaris desa, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Pelatihan dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten, akademisi, atau lembaga pelatihan yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan desa. Menyusun perencanaan APBDes yang lebih realistis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui musyawarah desa (musdes) yang partisipatif. Perencanaan harus mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan, ketersediaan sumber daya, dan potensi kendala teknis di lapangan. Perlu dilakukan analisis kebutuhan yang mendalam dan pemetaan prioritas program yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, T. (2021). *Analisis anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap pembangunan desa di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi* [Skripsi, Universitas Medan Area].
- [2] Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- [3] Fathah, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48. <https://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>
- [4] Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- [5] Halim, A., & Kusufi, S. (2014). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Salemba Empat.
- [6] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. (1996). Kementerian Dalam Negeri.
- [7] Kuncoro, H. (2008). Variansi anggaran dan realisasi anggaran belanja: Studi kasus pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 1(2), 126–143. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v1i2.2362>
- [8] Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- [9] Mardiana, T. (2020). Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamaju. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123–135.
- [10] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. ANDI.
- [11] Mardiasmo. (2019). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. ANDI.
- [12] Martiningsih, R. S. P. (2024). Efektivitas dan pertumbuhan pengelolaan keuangan desa: Peran kompetensi aparatur dan transparansi. *Jurnal Keuangan Daerah*, 18(2), 77–94.
- [13] Mutiha, A. H. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bogor tahun anggaran 2010–2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2), 16–28. <http://www.jvi.ui.ac.id/index.php/jvi/article/view/101>
- [14] Nisa, A. (2025). Analisis efektivitas dan pertumbuhan pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintah desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(1), 45–58.
- [15] Nurhayati. (2015). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(1), 55–66. <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/378>
- [16] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Kementerian Dalam Negeri.
- [17] Prasetyo, E., & Sari, D. (2021). Evaluasi kinerja keuangan desa melalui realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(3), 78–89.
- [18] Rahmawati, N. K. E., & Putra, I. W. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010–2012. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2176–2204. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi>
- [19] Sartika, D. (2019). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 89–101.
- [20] Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- [21] Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis laporan keuangan: Teori, aplikasi, dan hasil penelitian*. Pustaka Baru Press.
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Sekretariat Negara.
- [23] Vitaloka, V., Firayanti, Y., & Marhamah, M. (2024). Analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 737–751. <https://doi.org/10.62335/mpak5f57>